

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja, yang secara teoritis mendasari seluruh kinerja sebuah perusahaan. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat dilakukan pengukuran efisiensi, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang optimal dengan tingkat input yang ada, atau menggunakan tingkat input yang minimum dengan tingkat output tertentu. Dengan diidentifikasi alokasi input dan output, maka dapat dianalisis lebih jauh untuk melihat penyebab ketidakefisienan (Hadad:2003).

Perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting peranannya dalam pembangunan ekonomi Indonesia, tidak hanya di Indonesia, di banyak negara industri perbankan sangat dibutuhkan terutama dalam pembiayaan aktivitas yang berhubungan dengan uang (Permono:2000). Peranan perbankan sangat penting terutama dalam menghadapi era pasar bebas dan globalisasi yaitu sebagai perantara antara sektor defisit dengan sektor surplus maupun sebagai *agent of development*, namun dalam hal ini masih dibebankan pada bank-bank milik pemerintah (Dedy:20003). Bank memiliki fungsi yaitu menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, oleh karena itu bank harus memiliki kinerja yang baik dari semua aktivitas usahanya (Amin: 1996).

Saat ini perbankan dunia mengenal dua jenis perbankan yaitu syariah dan konvensional. Pada dasarnya bank syariah dengan bank konvensional memiliki kesamaan fungsi yakni menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, hanya saja terdapat perbedaan mendasar dalam hal imbalan. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*).

Pertama kali perbankan syariah mulai menyebar luas di negara Arab dan negara muslim seperti Iran, Pakistan dan Bangladesh di tahun 1970 an. Bank syariah pertama di dunia adalah Dubai Islamic Bank yang berada di Uni Emirat Arab, yang kemudian diikuti dengan didirikannya Islamic Development Bank di Jeddah, Arab Saudi.

Di Indonesia sendiri perbankan syariah pertama kali dikenal pada tahun 1991 yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai cikal bakal lahirnya perbankan syariah lainnya. Kehadiran perbankan syariah semakin semarak dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang mengatur secara terperinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh perbankan syariah.

Meski tergolong masih baru, perbankan syariah adalah perbankan yang memiliki tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang cukup signifikan baik di Indonesia maupun beberapa negara di dunia khususnya negara Islam. Perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dari beberapa indikasi seperti peningkatan pada besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK), aset, dan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Kinerja perbankan syariah yang semakin membaik

terlihat dari rasio keuangan seperti *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) yang semakin tinggi. Seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 : Perkembangan Aset, DPK, dan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2005-2011 (Dalam Milyar Rupiah)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Aset	20.879	26.722	36.538	49.555	66.090	97.519	145.466
DPK	15.581	24.128	28.011	36.852	52.272	76.037	115.415
Pembiayaan	15.232	20.445	27.944	38.199	46.887	68.181	186.359

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2011: data diolah

Terlihat bahwa selama kurun waktu 7 tahun (tahun 2005 - tahun 2011) perkembangan aset, DPK, dan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Demikian pula dengan kinerja perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perbaikan kinerja seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 : Perkembangan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2005-2011 (dalam persen)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
NPF	2,82	4,75	4,05	3,95	4,01	3,02	2,52
FDR	97,75	98,90	99,76	103,65	89,69	89,66	88,94

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2011: data diolah

Dengan paparan beberapa data tersebut, maka pengukuran tingkat efisiensi semakin dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan dengan mengetahui tingkat efisiensi suatu bank syariah, maka kita dapat mengetahui seberapa besar kemampuan bank tersebut dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya dan memberikan manfaat yang lebih besar pada masyarakat sebagai nasabahnya baik sebagai nasabah penabung maupun nasabah pembiayaan.

Pengukuran tingkat efisiensi dalam industri perbankan syariah juga menjadi sesuatu yang *urgent* dengan melihat ketatnya persaingan dalam industri perbankan syariah, khususnya selama tahun 2005 sampai tahun 2011. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan pesatnya pertumbuhan jumlah bank syariah yang berdiri selama rentang waktu tersebut. Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa dalam rentang waktu tersebut terjadi peningkatan yang cukup pesat perihal pertumbuhan jumlah bank syariah di Indonesia baik pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Oleh karena itu dengan pengukuran efisiensi pada bank syariah dapat menjadi suatu indikator penting dalam melihat kemampuan bank syariah untuk bertahan dan menghadapi ketatnya persaingan pada industri perbankan syariah maupun pada persaingan pada industri perbankan nasional di Indonesia.

Tabel 1.3 : Pertumbuhan Bank Syariah Tahun 2005-2011

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Bank Umum Syariah	3	3	3	5	6	11	11
Unit Usaha Syariah	19	20	26	27	25	23	24

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2011: data diolah

Tingkat kesehatan bank menjadi salah satu indikator yang digunakan masyarakat dalam menilai kualitas suatu bank. Menurut Triandaru dan Budisantoso (2006:51) menyebutkan bahwa: “Kesehatan bank sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku”.

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi

dilakukan, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang optimal dengan tingkat input yang ada, atau mendapatkan input yang minimum dengan tingkat output tertentu.

Pada umumnya para pelaku industri perbankan mengharapkan dapat mencapai kondisi ideal, yaitu suatu kondisi dengan nilai efisiensi sama dengan 1 (satu) atau 100%. Hal ini berarti jumlah keluaran yang dihasilkan sama dengan jumlah masukan yang digunakan. Namun, pada kenyataannya kondisi ideal tersebut sangat sulit tercapai karena terdapat faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah tidak sebandingnya output dengan input yang ada.

Karena kondisi efisiensi 100% sangat sulit untuk dicapai, maka dilakukan pengukuran efisiensi yang bersifat relatif yang dalam hal ini nilai efisiensi suatu objek tidak dibandingkan dengan kondisi ideal (100%) melainkan dibandingkan dengan nilai efisiensi objek-objek lain.

Salah satu indikator efisiensi bank secara operasional dapat dilihat dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Semakin rendah rasio BOPO, semakin efisien bank tersebut dalam operasionalnya (Mardanugraha dalam Hartono: 2009). Besar rasio BOPO yang dapat ditolerir oleh Bank Indonesia adalah sebesar 93,52%. Jika angka rasio menunjukkan angka diatas 90% dan mendekati 100% ini menunjukkan kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah. Jika rasio BOPO rendah, yaitu mendekati 75% ini berarti kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi (Novarini:2011).

Efisiensi industri perbankan merupakan parameter kinerja yang cukup populer digunakan. Pengukuran efisiensi banyak digunakan untuk menjawab

kesulitan-kesulitan dalam menghitung ukuran kinerja-kinerja perusahaan. Perhitungan tingkat keuntungan perusahaan biasanya digunakan untuk menunjukkan hasil kinerja yang baik, tapi perhitungan ini kadang tidak masuk dalam kriteria bank sehat dari sisi peraturan Bank Indonesia. Industri perbankan Indonesia adalah industri yang paling banyak diatur oleh peraturan-peraturan dari Bank Indonesia sekaligus menjadi ukuran kinerja dunia perbankan Indonesia. Peraturan mengenai *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Reserve Requirement*, *Legal Lending Limit*, dan kredibilitas para pengelola bank adalah contoh peraturan-peraturan yang sekaligus menjadi kriteria kinerja di dunia perbankan Indonesia.

Pengukuran efisiensi biaya dengan cara mengidentifikasi komponen input dan komponen output sehingga dapat dianalisis penyebab ketidakefisiensian industri perbankan Indonesia. Komponen input terdiri dari biaya bagi hasil yang dibayarkan bank atas simpanan pihak ketiga dan biaya tenaga kerja sedangkan komponen output terdiri dari total pembiayaan yang diberikan baik kepada pihak terkait dengan bank dan surat berharga yang dimiliki oleh bank tersebut.

Pendekatan parametrik menghasilkan *Stochastic Cost Frontier* yang memperhitungkan *random error*, dan menghasilkan kesimpulan secara statistika. Dengan demikian perusahaan perbankan dapat menetapkan strategi usahanya yang tepat setelah mengetahui tingkat efisiensinya. Analisis efisiensi perbankan berdasarkan kelompok bank dapat memberikan pengetahuan kelompok bank yang paling efisien dalam operasionalnya maupun kelompok bank yang tidak efisien, sehingga bank Indonesia dapat menetapkan dan menerapkan strategi pengawasan yang tepat pada kelompok bank yang tidak efisien tersebut. Hasil penelitian Fries (2004) dan Bonin (2004) juga menunjukkan bahwa bank swasta efisiensi biaya

nya lebih baik daripada bank pemerintah, bank swasta asing efisiensi biaya nya paling efisien kemudian bank swasta domestik dan bank pemerintah yang paling tidak efisien.

Dengan melihat permasalahan tersebut, maka penelitian ini mengambil judul “ Analisis Efisiensi Biaya Industri Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Perbandingan antara Bank Syariah Devisa dan Bank Syariah Non Devisa Periode 2010-2014).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

- a) Komponen-komponen input dan output apa yang mempengaruhi efisiensi biaya industri perbankan syariah di Indonesia.
- b) Bagaimana tingkat efisiensi biaya industri perbankan syariah di Indonesia meliputi bank syariah devisa dan bank syariah non devisa periode 2010-2014.
- c) Apakah terdapat perbedaan nilai efisiensi biaya industri perbankan syariah di Indonesia berdasarkan masing-masing kelompok bank meliputi bank syariah devisa dan bank syariah non devisa periode 2010-2014.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a) Menganalisis nilai efisiensi biaya industri perbankan syariah di Indonesia meliputi bank syariah devisa dan bank syariah non devisa periode 2010-2014.
- b) Menganalisis perbedaan nilai efisiensi biaya industri perbankan syariah di Indonesia berdasarkan masing-masing kelompok bank meliputi bank syariah devisa dan bank syariah non devisa periode 2010-2014.
- c) Menganalisis Komponen-komponen input dan output apa yang mempengaruhi efisiensi biaya industri perbankan syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

Bagi peneliti dan pembaca, dapat menambah wawasan dan keilmuan, khususnya tentang perbankan syariah.

- a) Bagi perusahaan perbankan syariah, dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang.
- b) Bagi pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, penilaian efisiensi perbankan syariah dapat digunakan untuk menetapkan dan menerapkan strategi pengawasan yang tepat pada bank yang bersangkutan.

- c) Bagi masyarakat dengan mengetahui efisiensi perbankan syariah maka masyarakat akan merasa lebih tenang atau aman dalam menempatkan dananya di perbankan syariah karena yakin bank syariah akan mengelola dana tersebut dengan baik.



THE
Character Building
UNIVERSITY